

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi telah memberikan perubahan pelayanan publik, seperti proses penggunaannya sebagai alat bantu dan pengelola informasi¹. Perkembangan teknologi komunikasi ini tentu saja memberikan kemudahan bagi masyarakat, baik dalam mencari informasi maupun menerima informasi yang diinginkan dengan mudah, di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja.

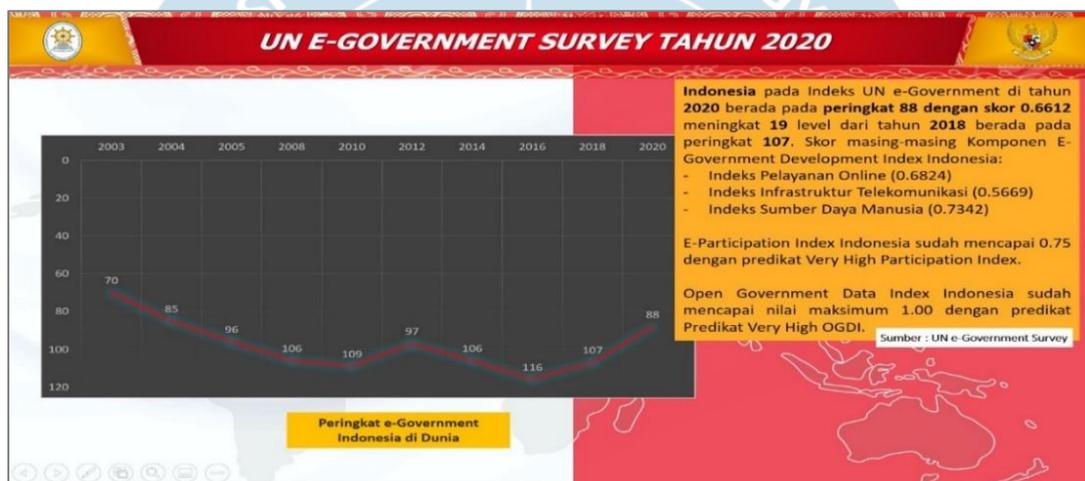
Hadirnya teknologi informasi telah memberikan akses dan cara baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem informasi. Masyarakat tidak lagi hanya dapat melihat atau mengonsumsi informasi di situs-situs berbasis internet. Namun, mereka juga dapat turut berpartisipasi dengan cara memberikan komentar, menulis berita atau tulisan, mengunggah foto, dan video.

Pemanfaatan teknologi informasi-komunikasi (TIK) untuk menyampaikan informasi kepada publik melalui laman web dan media sosial sudah sampai ke tingkat desa. Pemerintah-pemerintah desa sudah memanfaatkan teknologi informasi-komunikasi untuk membangun komunikasi dengan masyarakat, dan untuk memperluas serta memudahkan akses informasi oleh masyarakat. Demikian juga, partisipasi masyarakat desa dapat dilakukan melalui website dan media sosial

¹ Parsaorantua, P. H., Pasoreh, Y., & Rondonuwu, S. A. (2017). *Implementasi teknologi informasi dan komunikasi (Studi tentang web e-government di Kominfo Kota Manado)*. ACTA DIURNA KOMUNIKASI, 6 (3).

resmi Desa.² Beberapa media sosial yang biasa digunakan oleh pemerintah, seperti: WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter).³

Partisipasi dan keterbukaan publik sejak implementasi e-Government di Indonesia mengalami peningkatan. Survei yang dilakukan oleh E-Government Development Index (EGDI) menunjukkan bahwa pengembangan dan implementasi sistem e-government atau sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE), Indonesia menempati peringkat ke-88 dari 193 negara, dengan skor EGDI sebesar 0,6612. Ini menunjukkan adanya peningkatan 19 level dibandingkan dengan tahun 2018.⁴



Gambar 1 – Hasil Survei e-Government

Sumber: Website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Walaupun demikian, implementasi media penyebar informasi yang digunakan pemerintah di Indonesia masih sebatas memberikan informasi saja.⁵ Banyak sistem

² Aji, A. K., Ash-shidiqqi, E. A., & Isharyanto, I. (2018). *Lapor Lurah! : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Melalui Penggunaan Teknologi Informatika*. *Prosiding Senaspolhi*, 1(1).

³ Yovinus, Y. (2018). *Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung*. *Jurnal Academia Praja*, 1(01), 185-211.

⁴ Survei e-Government oleh United Nations (UN) tahun 2020 <https://bit.ly/3mer1jn> diakses pada 21 Juni 2021.

⁵ Anna, NEV, Puspitasari, D., Mannan, EF, & Mutia, F. (2013). *Evaluasi Website E-Government Ibukota Provinsi di Indonesia*. *PALIMPEST*, 5 (01), 67-73.

informasi yang diperkenalkan oleh pemerintah tidak berjalan secara optimal, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Hal tersebut terungkap dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dwi Apriyanto, Rudi dan Prihantono Putro, (2018), dimana hanya 27% proyek sistem informasi dari 110 proyek sistem informasi yang dikerjakan oleh pemerintah yang selesai tepat waktu. Sedangkan 55% proyek lainnya bermasalah, dan 18% dari proyek tersebut dibatalkan.

Ada beberapa masalah terkait partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan pemanfaatan media penyebaran informasi. Menurut Praditya (2014), kebijakan dan program-program pemerintah pusat maupun daerah masih sering menempatkan masyarakat sebagai objek bukan sebagai subjek dalam pemanfaatan teknologi komunikasi. Hal ini juga dialami oleh masyarakat di Kota Surabaya. Partisipasi masyarakat dalam program e-RT/RW masih terbatas. Hal itu dikarenakan masyarakat masih diposisikan sebagai objek program, sehingga sedikit yang terlibat dalam program perencanaan e-RT/RW (Ningrum 2012). Sistem informasi tersebut sebagian besar masih sebagai media *read-only* yang mana beberapa aktor membuat konten dan yang lain mengonsumsinya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi yang terlihat aktif tidak selalu memberikan dampak yang positif. Namun, kurangnya bukti empiris mengenai dampak partisipasi menyebabkan hasilnya tetap kurang jelas⁶. Rondinelli (dalam Weston, 2014) menyebutkan kurangnya partisipasi menyebabkan masalah dalam pelaksanaan pembangunan.

⁶ Weston, C. M. G. (2014). *Assessing Participation in Agricultural Development Projects: A Case Study of the Mbalangwe Irrigation Scheme, Morogoro Rural District, Tanzania* (Doctoral dissertation, The Ohio State University).

Dalam penelitian Ives dan Olsen (1984), Bucky dan Hartwick (1994), Guimaraes et al. (2003), ditemukan bahwa partisipasi aktif dalam pengembangan sistem informasi memiliki korelasi positif dengan keberhasilan sistem. Tetapi penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa partisipasi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan keberhasilan sistem (Barki dan Harwick 1989 dalam Adi 2006). Perbedaan temuan riset ini menjadi indikasi bagi pentingnya pendekatan kontijensi dalam melihat hubungan antara partisipasi pengguna dan keberhasilan sistem informasi.

Partisipasi sebagai peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan, baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Sebagaimana dikatakan oleh Hoofsteede (1971) yang dikutip oleh Hadi (2010): *“The taking part in one or more phases of the process”* (mengambil bagian dalam suatu atau lebih tahapan dari suatu proses).

Merencanakan suatu program pembangunan yang baik harus berdasarkan pada kebutuhan dan masalah yang terjadi serta dialami oleh masyarakat. Selain itu, program yang baik harus melibatkan masyarakat dengan harapan program tersebut lebih terarah karena masyarakat sendiri memiliki kesempatan terlibat.

Gagasan di atas relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Conyers (dalam Agustin, 2016) bahwa pentingnya partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya suatu program mungkin akan gagal. Oleh karena itu, masyarakat perlu terlibat mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi.

Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga ikut terlibat dalam pengelolaan teknologi informasi⁷. Walaupun demikian, dalam konteks penelitian sistem informasi, baik ilmu akademik maupun praktis berpendapat bahwa orientasi terhadap keterlibatan masyarakat masih belum banyak dilakukan (Greitens & Strachan, 2011).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat pada Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya di desa Nglegi.

Salah satu media yang digunakan sebagai media partisipasi masyarakat adalah Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya. SID Berdaya hadir sebagai bentuk kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Combine Resource Institution (CRI) di beberapa wilayah Indonesia⁸. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dapat berbentuk penyampaian aspirasi, saran, dan kritik terhadap kinerja pemerintah.

Penelitian ini membatasi pada salah satu elemen dari SID Berdaya, yaitu berita desa. Berita desa adalah sarana untuk menyuarakan pendapat, saran, dan kritik dari masyarakat dalam bentuk tulisan, foto, dan atau video.

Peneliti melihat bahwa pada kolom “berita desa” lebih banyak informasi berita desa dan juga interaksi antara masyarakat dengan pemerintah dalam bentuk tulisan maupun foto. Selain itu, SID Berdaya Desa Nglegi juga mendapatkan

⁷Van Eijk, CJ, & Steen, TP (2014). Mengapa orang memproduksi: Menganalisis persepsi warga tentang keterlibatan perencanaan bersama dalam layanan perawatan kesehatan. *Tinjauan Manajemen Publik*, 16 (3), 358-382.

⁸ Jainu. dkk. (2015). *Desa Berbagi Cerita Berdaya dengan Sistem Informasi Desa*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Combine Resource Institution.

penghargaan dalam “Proses Peliputan Jurnalis Warga dan Pelaporan Pertanggungjawaban”⁹. Penghargaan tersebut adalah representasi dari partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tentang Desa Nglegi.

Kondisi tersebut, dapat diasumsikan bahwa masyarakat Desa Nglegi terbuka, mereka turut berpartisipasi dalam mengisi kolom berita dengan gagasan-gagasannya. Maka dari itu, peneliti ingin melihat proses keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi. Melihat apa yang dilakukan masyarakat ketika berpartisipasi membuat berita desa dan bagaimana mereka melakukannya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam pembuatan berita desa pada Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya di Desa Nglegi?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui proses partisipasi masyarakat dalam pembuatan berita desa pada Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya di Desa Nglegi.

1.4 Tinjauan Pustaka

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, Wicaksono, F (2019) dengan judul *Anti Klimaks Implementasi E-Government: Analisis Partisipasi Masyarakat Petani Di Kabupaten Gunungkidul*. Penelitian ini tentang inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengoptimalkan layanan publik melalui implementasi e-Government.

⁹ <https://www.nglegi-patuk.desa.id/> diakses pada 18 Juni 2021.

Penelitian ini menemukan bahwa kondisi masyarakat belum memanfaatkan layanan publik berbasis TIK secara optimal. Kurang efektifnya pemanfaatan e-Government disebabkan oleh karakteristik latar belakang pekerjaan masyarakat sehingga mempengaruhi pola dan aktivitas pemanfaatan teknologi informasi. Masyarakat desa yang sebagian besar petani dan buruh tani jarang mengakses informasi melalui SID. Kebanyakan masyarakat masih mengandalkan kepala dukuh atau perangkat desa untuk keperluan administrasi mereka.

Kedua, Ningrum (2012) yang meneliti *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Elektronik Rukun Tetangga Rukun Warga (e-RT/RW) di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya*. Peneliti mendeskripsikan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam implementasi program e-RT/RW mulai dari proses pengambilan keputusan, partisipasi representatif, partisipasi dalam bentuk dukungan, dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil.

Penelitian Ningrum menunjukkan bahwa masyarakat kurang antusias dalam program e-RT/RW itu. Masyarakat juga tidak terlibat langsung, mereka diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat, seperti ketua RW/RT, ketua karang taruna. Partisipasi wakil-wakil masyarakat itu juga kurang karena jarang hadir dalam musyawarah program e-RT/RW. Selain itu ditemukan bahwa masyarakat belum terbiasa dengan premammalian ide, saran dan kritik melalui media *online*.

Ketiga, Totok Wahyu, Nunung Prajarto dan Budi Guntoro (2014) yang meneliti “Performance e-Government Untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan yang dimediasi e-Government menunjukkan kualitas yang dikategorikan sedang. Partisipasi

tersebut diamati dari pencarian dan penyampaian informasi melalui web, konsultasi, dialog, dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah.

Keempat, Sulistyowati dan Candra (2013) yang meneliti partisipasi warga terhadap Sistem Informasi Desa di Desa Terong, Dlingo, Bantul. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap keberadaan sistem informasi desa tampak dalam pengisian data SID. Keaktifan masyarakat terlihat dari banyaknya yang menyampaikan informasi dan melakukan pengisian data kependudukan ke SID. Partisipasi masyarakat tersebut merupakan hasil sinergi antara aparat desa, LSM, dan masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Peneliti berusaha untuk tidak menggunakan perspektif yang sama dan tidak menduplikasi penelitian sebelumnya. Kesamaannya adalah penelitian ini juga meneliti partisipasi masyarakat dalam sistem informasi di tingkat desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus utama penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada proses partisipasi masyarakat dalam pembuatan berita desa pada SID Berdaya di desa Nglegi, Gunungkidul.

1.5 Kerangka Konseptual

1.6.1 Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi dalam perkembangannya memiliki kesamaan dalam beberapa hal, namun memiliki banyak arti. Partisipasi adalah keterlibatan individu secara mental dan emosional dalam suatu kelompok. Individu terlibat di setiap prosesnya dari awal hingga tujuan suatu kelompok tercapai. Hal tersebut sesuai dengan

pernyataan Davis (2002), partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab di dalamnya.

Keikutsertaan yang dilakukan bukan hanya dalam menyetujui ataupun menolak kebijakan pemerintah, namun juga memberikan saran serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Bank Dunia (dalam Tanjung, 2017) mendefinisikan partisipasi sebagai sebuah proses dimana para pemangku kepentingan mempengaruhi dan berbagi kendali atas inisiatif dan keputusan. Sederhananya, partisipasi memberikan kekuasaan kepada rakyat.

Partisipasi masyarakat merupakan proses aktif di mana penerima manfaat atau kelompok mempengaruhi arah dan pelaksanaan kegiatan. Anggota komunitas harus memiliki dan mengendalikan proses dengan membuat keputusan tentang kemajuannya dan merancang kegiatan selanjutnya.

Partisipasi adalah upaya kolektif orang-orang untuk mengumpulkan sumber daya untuk mencapai tujuan mereka. Dalam hal ini, partisipasi dipandang sebagai proses aktif di mana peserta mengambil inisiatif dan tindakan yang dirangsang oleh pemikiran sendiri dan pertimbangan melakukan kontrol yang efektif (Barasa & Jelagat, 2013).

Mubyarto (dalam Astawa 2019:175) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan sendiri. Bennett (dalam Kelly dan Van,

1995) partisipasi masyarakat memiliki arti beragam tergantung konteks dan keterlibatan masyarakat pada bentuk komunitas tertentu.

Berbeda dengan Schurink (dalam Dube, 2009) yang mendefinisikan partisipasi sebagai suatu sistem dan prosedur demokratis yang mendorong anggota masyarakat untuk terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Partisipasi mengacu pada berbagai macam proses yang berbeda, misalnya kapasitas untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi kemasyarakatan (UNRISD, dalam Kelly dan Van, 1995).

Sedangkan menurut Conyers (dalam Sagita, 2016) partisipasi masyarakat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Alasannya: (1) Masyarakat merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran tentang kondisi dan kebutuhan daerah; (2) Masyarakat lebih percaya pada program kegiatan pembangunan bila dilibatkan dalam perencanaan, dan memiliki tanggung jawab; (3) Keterlibatan masyarakat sebagai bentuk terlaksananya hak demokrasi.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan atas dasar inisiatif masyarakat sendiri, artinya masyarakat berpartisipasi atas kesadarannya sendiri untuk mendukung program pemerintah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga terwujud apabila diminta, artinya pemerintah meminta atau memaksa masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi bentuk lain adalah keterlibatan masyarakat atas adanya timbal balik finansial atau karena adanya insentif, yakni partisipasi yang dilakukan bukan atas kesadaran sendiri melainkan adanya bayaran atau insentif tertentu jika dilakukan.

Uphoff dan Cohen (1980) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan sejumlah orang dalam situasi atau tindakan yang meningkatkan kesejahteraan

mereka, misalnya pendapatan, keamanan, atau menghargai. Terdapat tiga bagian untuk melihat keterlibatan masyarakat, yaitu: (1) bentuk partisipasi; (2) siapa yang berpartisipasi; (3) bagaimana partisipasi terjadi. Ketiga bagian tersebut terdapat di dalam setiap tahapan dari proses partisipasi masyarakat. Proses partisipasi terbagi ke dalam empat bagian, yaitu:

a) Partisipasi dalam perencanaan

Keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk program yang direncanakan. Kemampuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan adalah bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh setiap individu yang memiliki hak.

b) Partisipasi dalam pelaksanaan

Keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung terlaksananya program pembangunan baik kontribusi dalam bentuk tenaga, informasi, finansial, dan lainnya bagi terselenggaranya program pembangunan.

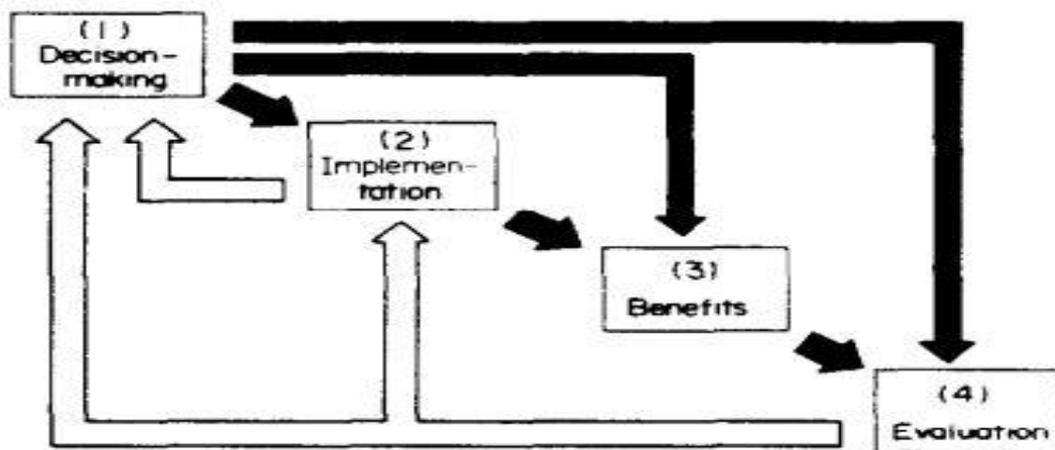
c) Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Proses partisipasi dalam pemanfaatan hasil merupakan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan maka semakin besar manfaat program yang tepat sasaran.

d) Partisipasi dalam evaluasi

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program selanjutnya. Partisipasi pada tahap ini diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai program, misalnya memberikan saran-saran dan kritik.

Proses partisipasi masyarakat membentuk siklus dalam kegiatan. Siklus partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa setiap proses partisipasi satu dengan yang lainnya saling berkaitan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2 – Siklus Proses Partisipasi

1.6.2 Participatory media

Participatory media adalah media komunikasi di mana khalayak dapat berperan aktif dalam proses mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan menyebarkan konten. Informasi yang relevan dan beragam muncul dalam referensi dari media berbasis internet. Sumber informasi yang menyediakan

informasi penting untuk proses pengambilan keputusan dapat dimotivasi oleh insentif komersial atau politik untuk secara sengaja menciptakan bias informasi.

Media massa tradisional seperti surat kabar, televisi, dan radio yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi ini. Media tersebut kurang mendukung keberagaman yang memadai dalam berbagai informasi dan seringkali juga tidak dapat diandalkan. Meskipun ini keterbatasan dapat diatasi untuk sebagian besar oleh media yang baru. Bentuk media partisipatif yang diatur sendiri, termasuk blog, youtube, dan podcast (Seth 2007). Ini mempengaruhi kemampuan bentuk-bentuk media baru ini untuk menyediakan dan memastikan relevan, beragam dan penyampaian informasi yang baik.

Media partisipatif memiliki hubungannya dengan serangkaian serumpun ide, termasuk media aktivis, jurnalisme warga, video saksi, video komunitas, dan amatir media. Masing-masing istilah ini memiliki sejarah yang khas dan terkadang valensi politik. Hasil dari semuanya dari ide-ide ini, bagaimanapun, adalah implikasi bahwa media yang digunakan dicirikan sebagai arus utama, dominan, atau industri dijalankan oleh elit untuk melayani agenda perusahaan besar dan karenanya tidak dapat digunakan untuk menyampaikan tujuan yang benar-benar demokratis secara radikal. Bahkan, media publik telah lama dikuasai oleh koneksi dan sponsor, baik perusahaan maupun negara, sebagai tidak dapat benar-benar mewakili orang-orang.

1.6.3 Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya

Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya merupakan program yang diinisiasi oleh Combine Resource Institution (CRI) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah di beberapa wilayah Indonesia sejak tahun 2009 hingga saat ini¹⁰.

Program tersebut merupakan terobosan untuk membantu pemerintah desa dalam tata kelola untuk mengumpulkan, menyimpan, serta pemanfaatan data dan informasi dalam mendukung pengelolaan sumber daya berbasis komunitas di tingkat desa. Wilhem Wau (dalam Sulistyowati dan Dibyorin, 2013) menyatakan SID adalah informasi yang diimplementasikan melalui perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa.

Dikutip dari buku "*Desa Berbagi Cerita Berdaya dengan Sistem Informasi Desa*" disebutkan tentang prinsip-prinsip SID Berdaya. Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas, dan keberlanjutan. Prinsip partisipasi dalam sistem informasi, artinya mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara pribadi maupun kelompok tertentu sesuai dengan kebutuhannya.

Prinsip transparansi, segala program yang berkaitan dengan desa baik itu kegiatan maupun anggaran dan informasi lainnya pihak perangkat desa wajib memberi tahukan melalui SID Berdaya. Tujuannya adalah keterbukaan informasi kepada publik. SID Berdaya tidak akan berjalan utuh apabila hanya salah satu antara pemerintah desa atau warga yang menerapkannya.

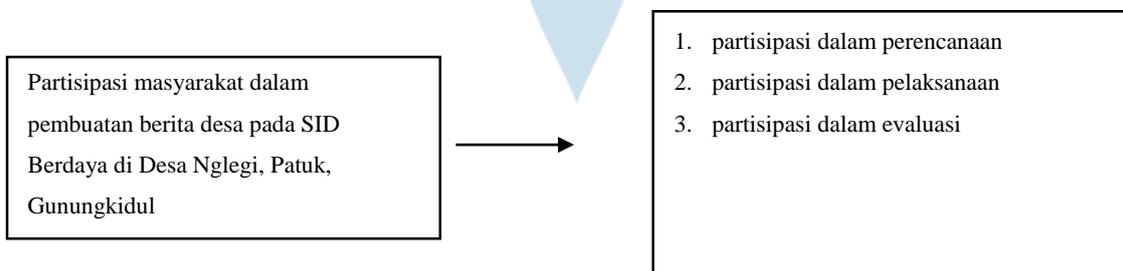
¹⁰ Jahja, Ranggoaini. dkk. (2012). *Sistem Informasi Desa: Sistem Informasi dan Data untuk Pembaharuan Desa*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Combine Resource Institution.

Beberapa alasan yang melatar belakangi terbentuknya SID Berdaya, yaitu:¹¹

1. Adanya kebutuhan untuk mengamankan dokumen-dokumen desa secara digital
2. Ada suatu kebutuhan untuk mencari data kependudukan, data desa dan informasi lainnya terkait desa secara cepat dan tepat
3. Adanya kebutuhan sistem informasi yang bersifat terbuka (*open source*).

Portal SID Berdaya terdiri dari beberapa elemen yaitu, kolom “berita desa”, kolom “produk desa”, kolom “agenda desa”, dan kolom “data desa”. Penelitian ini membatasi pada salah satu elemen pada portal SID Berdaya, yaitu kolom “berita desa”. Berita desa adalah sarana untuk menyuarakan pendapat, saran, dan kritik dari masyarakat dalam bentuk tulisan, foto, atau video di kolom berita desa.

Kolom “berita desa” dirancang untuk mendengarkan keinginan maupun keluhan dari masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan berupa artikel opini, dan tulisan lainnya yang dapat diunggah pada kolom berita desa. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji bagaimana proses partisipasi masyarakat Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dalam pembuatan berita desa.



Gambar 3 - Kerangka Berpikir

¹¹ Jainu. dkk. (2015). *Desa Berbagi Cerita Berdaya dengan Sistem Informasi Desa*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Combine Resource Institution.

Bagan di atas menunjukkan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian. Proses partisipasi di dalam Pembuatan Berita Desa pada Sistem Informasi Desa Berdaya di Desa Nglegi, Patuk, Gunungkidul akan diteliti melalui tiga proses partisipasi, yaitu: (1) Partisipasi dalam perencanaan; (2) Partisipasi dalam pelaksanaan; (3) Partisipasi dalam evaluasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan. Bab II Metodologi dan Deskripsi Subjek Penelitian, meliputi jenis penelitian, informan, operasionalisasi konsep, metode pengumpulan data, analisis data, dan deskripsi subjek penelitian. Bab III Temuan dan Pembahasan, meliputi uraian hasil temuan dan pembahasan hasil dari proses pengolahan data penelitian. Bab IV Kesimpulan, meliputi jawaban atas pertanyaan penelitian dan ringkasan temuan penelitian.